



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI
PUBLIK
2023

PEMERINTAH KABUPATEN
GARUT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 dari PPID Utama Kabupaten Garut dapat tersusun dengan baik. Laporan ini disajikan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi PPID Utama Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku pengelola dan penyedia informasi publik kepada masyarakat.

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan dan peluang bagi PPID Utama Kabupaten Garut dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Garut. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, PPID Utama Kabupaten Garut terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja PPID Utama Kabupaten Garut dalam melayani kebutuhan informasi publik kepada masyarakat. Kami juga berharap laporan ini menjadi stimulus munculnya masukan dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Garut di masa depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga dengan terbitnya laporan ini, komitmen PPID Utama Kabupaten Garut dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Garut dapat semakin terwujud.

Garut, 14 Maret 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku PPID Utama

Gambaran Umum

Layanan Informasi Publik

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Hak ini memungkinkan setiap orang untuk:

- Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosial.
- Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memperkuat hak ini dengan menjamin hak warga negara untuk:

- * Mengetahui informasi publik.
- * Ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
- * Berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Komitmen ini diwujudkan melalui:

- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(<https://jdih.garutkab.go.id/detail/PERDA/2014/21>)
- Keputusan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/231128/perbup-kab-garut-no-23-tahun-2018>)
- Keputusan Bupati Nomor 366 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan
(<https://jdih.garutkab.go.id/detail/KEPBUP/2022/366>)

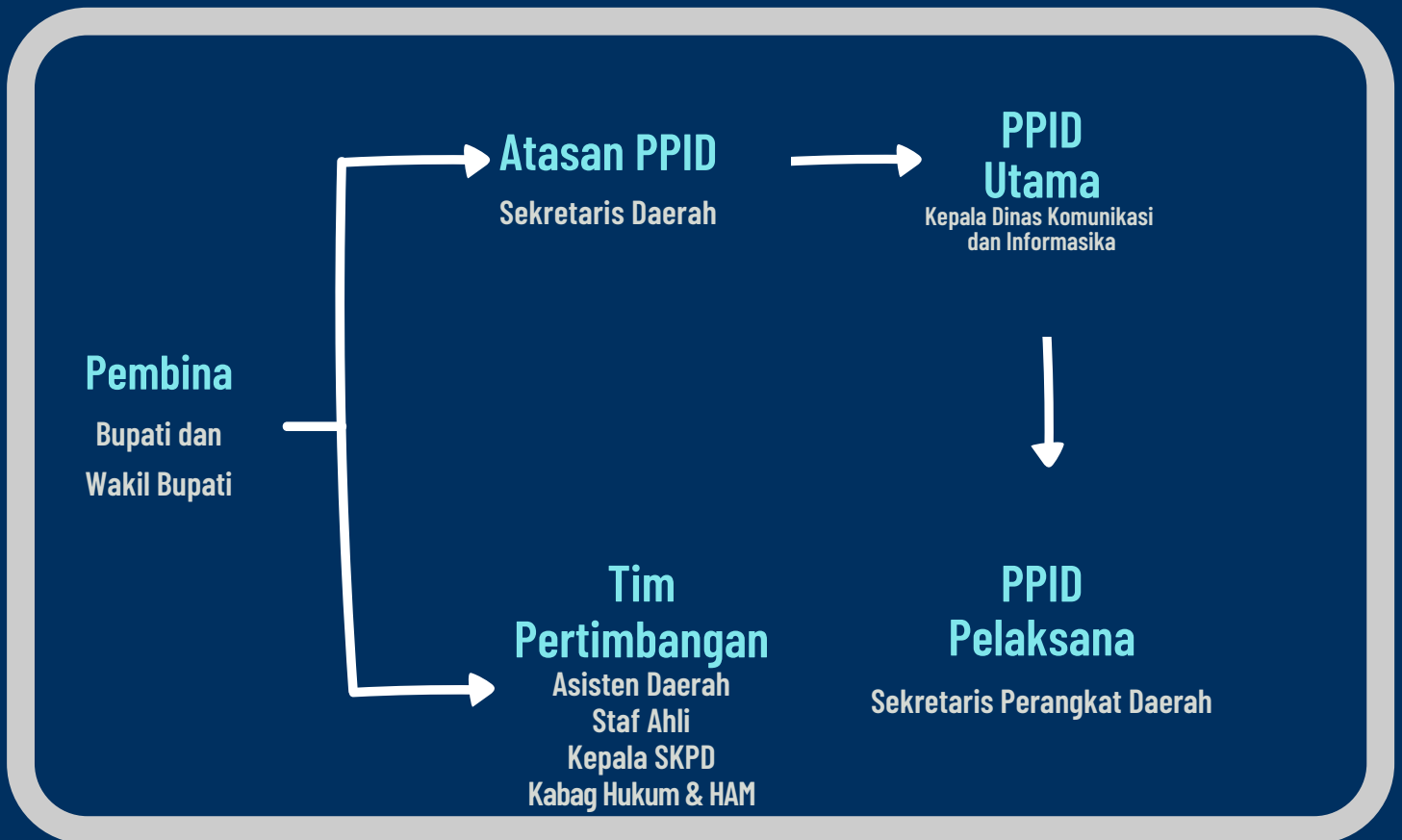
Peraturan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyediakan informasi yang berkualitas dan mudah diakses oleh publik. Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah Kabupaten Garut mengajak seluruh masyarakat untuk aktif memanfaatkan haknya dalam memperoleh informasi publik. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Garut yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Sekilas Tentang PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Garut



INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Garut meluncurkan inovasi Gaspols (Garut Single Portal Online Services) untuk meningkatkan transparansi informasi publik. Gaspols adalah aplikasi web yang menyajikan informasi terkait pembangunan daerah dalam berbagai aspek, seperti:

- **Ekonomi:** Data statistik ekonomi, potensi investasi, dan perkembangan UMKM di Kabupaten Garut.
- **Pariwisata:** Informasi objek wisata, akomodasi, kuliner, dan event wisata di Kabupaten Garut.
- **Bencana:** Data dan informasi terkait potensi bencana, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut.
- **Kehidupan Sosial:** Data statistik kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Garut.
- **Kesehatan:** Informasi fasilitas kesehatan, layanan kesehatan, dan program kesehatan di Kabupaten Garut.
- **Jaringan Telekomunikasi:** Data dan informasi terkait ketersediaan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Garut.

1

Klasifikasi Aplikasi

Klasifikasi aplikasi merupakan konten yang berisi aplikasi-aplikasi internal yang dimiliki oleh Kabupaten Garut.

2

CCTV

Menu ini berisi tayangan live CCTV di beberapa titik di Kabupaten Garut.

3

Data Analytics

Meliputi beberapa sub menu untuk menampilkan data publik yang disajikan secara analytic terkait smart government, smart living, smart economy, dan smart branding.

SOSIALIASI PENGELOLAAN PELAYANAN PPID

PPID Utama Kabupaten Garut menggelar Sosialisasi Penguatan Pengelolaan PPID pada tahun 2023. Kegiatan ini melibatkan partisipasi dari 42 kecamatan dan 33 SKPD di Kabupaten Garut, yang dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Garut dan memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu yang berada di tiap kecamatan dan SKPD.



1

Materi Pokok

- Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
- Tugas dan Fungsi PPID
- Standar Pelayanan Informasi Publik
- Penyelesaian Sengketa Informasi
- Praktik Pengelolaan PPID

Melalui sosialisasi ini, peserta diharapkan dapat memahami pentingnya pengelolaan PPID yang baik, memahami tugas dan fungsi PPID, serta memahami standar layanan informasi publik yang harus diterapkan. Selain itu, peserta juga diharapkan dapat memahami mekanisme untuk menyelesaikan sengketa informasi apabila terjadi.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, pengelolaan PPID di Kabupaten Garut akan semakin baik dan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat pun akan semakin meningkat. Sebagai tindak lanjut, disarankan untuk dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman tentang KIP dan pengelolaan PPID. Selain itu, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengelola PPID serta pembentukan forum komunikasi PPID untuk memperkuat koordinasi antar PPID juga dinilai perlu untuk dilaksanakan.

Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2023



PERMOHONAN MASUK

Jumlah Permohonan Informasi Publik
= 19



KEBERATAN

Jumlah Keberatan dari Pemohon = 7



PERMOHONAN SELESAI

Total Permohonan Selesai = 19 (100%)

Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2023

NO	BADAN PUBLIK	LAPORAN PELAYANAN INFORMASI			KETERANGAN
		PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	IKHTISAR PERMOHONAN	
1	Kecamatan Bayongbong	Bakti safe'at	16 Februari 2023	Permintaan Salinan Dokumen realisasi APDES kepada Kecamatan Bayongbong	Selesai
2	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut	Masyarakat Pemerhati Kebijakan	23 Februari 2023	1. Salinan dokumen LPJ Kegiatan Penataan Area Jogging Track di kawasan SOR R.A.A Adiwijaya tahun 2022 2. Salinan dokumen perencanaan, kontrak, perubahan sitpan, dari Jogging Track menjadi adanya tambahan bangunan Skate Park padaarea Jogging Track	Selesai
3	Dinas PertanianKab Garut	Asep Muhidin, SH	1 Februari 2023	Permintaan Penjelasan dan Salinan Dokumen kepada Dinas Pertanian Kab Garut mengensi peta Kawasan pertanian lahan basah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Selesai
4	Desa Jatisari Kecamatan Cisompet	MasyarakatPemerhati Kebijakan	3 Mei 2023	Permintaan Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Jatisari KecamatanCisompet Kab. Garut	Selesai
5	Desa Neglasari Kecamatan Cisompet	MasyarakatPemerhati Kebijakan	3 Mei 2023	Permintaan Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Desa Neglasari Kecamatan Cisompet Kab. Garut	Selesai
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut	Gerakan Peduli Lingkungan Garut	23 Mei 2023	Permohonan dokumen kegiatanpembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut kepada DinasBappeda Kab. Garut	Selesai
7	Dinas PertanianKab. Garut	Masyarakat Transparansi Jawa Barat	2 Juni 2023	1. Dokumen RENSTRA Tahun 2019 – 2024 2. Renja Tahun 2022 – 2023 3. RKA 2022 – 20223 4. DPPA 2022 5. Dokumen LAKIP 2021 dan 2022 Dokumen Inventaris Aset/Barang Milik Daerah	Selesai
8	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PP &PA Kabupaten Garut	Masyarakat Transparansi Jawa Barat	12 Juni 2023	1. Dokumen RENSTRA Tahun 2019 – 2024 2. Renja Tahun 2022 – 2023 3. RKA 2022 – 2023 3. DPPA 2022 4. Dokumen LAKIP 2021 dan 2022 Dokumen Inventaris Aset/Barang Milik Daerah	Selesai
9	Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Garut	Masyarakat Transparansi Jawa Barat	12 Juni 2023	1. Dokumen RENSTRA Tahun 2019 – 2024 2. Renja Tahun 2022 – 2023 3. RKA 2022 – 20223 4. DPPA 2022 5. Dokumen LAKIP 2021 dan 2022 6. Dokumen Inventaris Aset/Barang Milik Daerah	Selesai
10	Dinas PUPR Kab. Garut	MasyarakatPemertahi Kebijakan	18 Juli 2023	Permohonan Salinan kepada DinasPUPR mengenai dokumen : 1. Kajian awal yang menyimpulkan Pengadaan Kloset Jongkok harus dilaksanakan, berikut tujuan pengadaan tersebut dan manfaatnya 2. Daftar penerima manfaat daripengadaan tersebut 3. Salinan dokumen kontrak denganPT. Medikana Pratamajaya	Selesai
11	Inspektorat Kabupaten Garut	Asep Muhidin	19 Juli 2023	Permohonan Informasi dan SalinanDokumen 1. Salinan RKA tahun 2020 dan 2021yang telah diasistensi 2. Salinan DPA tahun 2020 dan tahun2021 yang telah diasistensi	Selesai
12	Dinas Kesehatan Kab. Garut	MasyarakatPemerhati Kebijakan	21 Agustus 2023	1. Pengadaan Bahan Habis Pakai HIV dan Silis (DAK FISIK) tahun 2020pagu anggaran 3.180.752.000,-	Selesai

Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2023

NO	BADAN PUBLIK	LAPORAN PELAYANAN INFORMASI			KETERANGAN
		PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	IKHTISAR PERMOHONAN	
				2. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Pajak Rokok) tahun 2020 pagu anggaran 40.988.977.802,- 3. Bantuan Biaya Kesehatan Keluarga Miskin/Kejadian Luar Biasa/Korban Bencana/Korban KDRT/Korban Tindakan Terorisme (DBHCT) tahun 2019 sebesar Rp. 36.409.250.528,- tahun 2020 pagu anggaran Rp. 2.000.000,- dan 4. Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kab. Garut Dinas Kesehatan Kab. Garut (Banprov) tahun 2020 pagu anggaran Rp. 25.000.011.000,-	
13	Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	Garut 60 Detik	02 Oktober 2023	Permintaan Informasi dan Salinan Dokumen : DPA Tahun 2023	Selesai
14	Dinas Perikanan dan Peternakan	Garut 60 Detik	02 Oktober 2023	Permintaan Informasi dan Salinan Dokumen : DPA Tahun 2023	Selesai
15	Dinas Tenaga Kerja	Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (FAKTA)	03 Oktober 2023	Permintaan Informasi dan Salinan Dokumen : 1. DPA Tahun 2022 dan Perubahan 2. DPA Tahun 2023	Selesai
16	Dinas Sosial	Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (FAKTA)	05 Oktober 2023	Permintaan Informasi dan Salinan Dokumen : DPA Tahun 2023	Selesai
17	Dinas Sosial	Garut 60 Detik	06 Oktober 2023	Permintaan Informasi dan Salinan Dokumen : DPA Tahun 2023	Selesai
18	Sekretariat DPRD	Masyarakat Pemerhati Kebijakan (MPK)	09 Oktober 2023	A. TAHUN 2020 1. Salinan surat laporan pertanggung jawaban keuangan beserta lampirannya program / kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD (DID) tahun 2020 yang menggunakan pagu anggaran Rp. 1.247.471.500,- yang semula / sebelumnya Rp. 1.003.571.300,-; 2. Salinan surat laporan pertanggung jawaban keuangan beserta lampirannya program / kegiatan Pembahasan Produk Hukum Daerah Dan DPRD (DID) tahun 2020 yang menggunakan pagu anggaran Rp. 1.574.768.300,- yang semula / sebelumnya Rp. 3.190.574.300,-. 3. Salinan surat laporan pertanggung jawaban keuangan beserta lampirannya program / kegiatan Penyusunan Raperda dan Sosialisasi Perda Prakarsa DPRD yang menggunakan pagu anggaran Rp. 393.948.696,- yang sebelumnya Rp. 810.879.000,-. B. TAHUN 2021 1. Salinan surat laporan pertanggung jawaban keuangan beserta lampirannya program / kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2021 yang menggunakan pagu anggaran Rp. 3.229.331.300,-. Apabila terdapat perubahan agar disampaikan berdasarkan perubahan; 2. Salinan surat laporan pertanggung jawaban beserta lampirannya program / kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik tahun 2021 yang menggunakan pagu anggaran Rp. 296.297.000,- agar dilampirkan produk naskah akademiknya. Apabila terjadi perubahan anggaran, agar dapat disampaikan dan dilengkapi bukti; 3. Salinan surat laporan pertanggung jawaban keuangan beserta lampirannya program / kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang menggunakan pagu anggaran Rp.	Selesai

Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2023

NO	BADAN PUBLIK	LAPORAN PELAYANAN INFORMASI			KETERANGAN
		PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	IKHTISAR PERMOHONAN	
				<p>8.418.886.900,- Apabila terjadi perubahan anggaran, agar dapat disampaikan dan dilengkapi bukti.</p> <p>C. TAHUN 2022</p> <p>Terdapat pengadaan Ipad Apple spesifikasi 11 inc 256 GB Wifi dengan pagu anggaran Rp. 1.028.058.000,- untuk anggota DPRD . Menjelang habis masa jabatan DPRD Garut, kami meminta Sekretariat DPRD menarik fasilitas tersebut dan menyampaikan kepada publik, karena fasilitas tersebut bukan milik hak pribadi.</p>	
19	Sekretariat DPRD Kabupaten Garut	Forum Anti Korupsi & Pemerhati Tata Kelola Anggaran	31 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Anggaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 	Selesai

Rencana Tindak Lanjut



PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Meningkatkan standar layanan informasi publik dengan mengacu pada peraturan terbaru dan standar nasional.
- Mempermudah akses informasi publik melalui berbagai platform digital dan media sosial.
- Meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu dalam merespon permintaan informasi publik.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi publik yang disediakan.